



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta (10110)

BIASA

Yth. Menteri Perhubungan

Surat Diterima	Dari	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
	Nomor Surat	KP 904/1/10/DRJD/2019
	Tanggal	22 Mei 2019
	Diterima Tanggal	28 Mei 2019
	Perihal	Permohonan Persetujuan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Unit Kerja Eselon I)
Kode Penyimpanan		0434/C/1015/V/2019
		KP 904/1/25 PHB 2019

Diteruskan Kepada Yth:

- | | |
|---|--|
| ☐ SKJ - Sekretaris Jenderal | ☐ KBMKG - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika |
| ☐ IRJ - Inspektur Jenderal | ☐ Sahli TEL (Teknologi, Energi & Lingkungan) |
| ☒ DRJD - Dirjen Perhubungan Darat | ☐ Sahli HRB (Hukum & Reformasi Birokrasi) |
| ☐ DRJL - Dirjen Perhubungan Laut | ☐ Sahli LMK (Logistik, Multimoda & Keselamatan) |
| ☐ DRJU - Dirjen Perhubungan Udara | ☐ Sahli EKK (Ekonomi, Kawasan & Kemitraan) |
| ☐ DRJKA - Dirjen Perkeretaapian | ☐ Staf Khusus |
| ☐ KBPSDMP - Kaban Pengembangan SDM | ☐ Tenaga Ahli |
| ☐ KBLT - Kepala Badan Litbang | ☐ Sekretaris Menhub |
| ☐ KBPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabotabek) | ☐ Sekpri |
| ☐ KSARNAS - Kepala Badan SAR Nasional | |

Isi Disposisi

- | | |
|---|---|
| ☐ Jadwalkan | ☐ Untuk Diselesaikan |
| ☐ Harap Mewakili | ☐ Untuk Dipelajari |
| ☐ Hadir Bersama Saya | ☒ Untuk Diketahui |
| ☐ Tanggapan/Saran | ☐ Untuk Difile |
| ☐ Siapkan Bahan | ☐ Untuk Dikoordinasikan dengan |

Catatan :

OK
Setyis
B

29/5/19. 1120

BUDI KARYA SUMADI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

Jakarta, 22 Mei 2019

Nomor : KP. 904 / 1 / 10 / DRJD / 2019
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2019 Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat (Unit Kerja
Eselon I)

Kepada
Yth. Bapak Menteri Perhubungan
Republik Indonesia

di -
JAKARTA

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini dengan hormat disampaikan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Unit Kerja Eselon I).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon perkenan Bapak Menteri Perhubungan untuk memberikan persetujuan guna proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri Perhubungan diucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

Jakarta, **22** Mei 2019

Nomor : **KP.904/1/10/DRJP/2019**
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2019 Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat (Unit Kerja
Eselon I)

Kepada
Yth. Bapak Menteri Perhubungan
Republik Indonesia

di -

JAKARTA

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini dengan hormat disampaikan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Unit Kerja Eselon I).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon perkenan Bapak Menteri Perhubungan untuk memberikan persetujuan guna proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri Perhubungan diucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784



PERJANJIAN KINERJA

2019



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 merupakan pernyataan perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2019 yang menjadi tolak ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2019.

Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, 17 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784



PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah Dalam	IKP 1a	Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0,676
		IKP 1b	Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97,00
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKP 2a	Rasio kejadian kecelakaan AKAP	%	7,9
		IKP 2b	Rasio kejadian kecelakaan Penyeberangan transportasi darat	%	1,2
		IKP 2c	Rasio Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	0,16
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 3a	Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	18
		IKP 3b	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	7,01
		IKP 3c	Presentase penurunan energi listrik pada APJ Solarcell	%	43
		IKP 3d	Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	83,24
		IKP 3e	Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	40
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IKP 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio	0,49
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKP 6a	Presentase implementasi peraturan	%	6,50
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IK 7a	Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%	100,00
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK 8a	Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	50
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKP 9a	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
		IKP 9b	Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai	Efektif
SS10	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKP 10a	Presentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	%	25,37
		IKP 10b	Presentase pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur	%	56,25
SS11	Terwujudnya <i>Good Governance & Clean Government</i> di Sub Sektor Perhubungan Darat	IKP 11a	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85%
		IKP 11b	Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30
		IKP 11c	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30
		IKP 11d	Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100
		IKP 11e	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	83
		IKP 11f	Presentase implementasi sistem informasi yang bangun untuk mendukung proses bisnis	%	100
		IKP 11g	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	96
		IKP 11h	Presentase Penerimaan PNPB	%	100

PROGRAM

1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Rp 4.013.014.163.000,00

Jakarta, 17 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

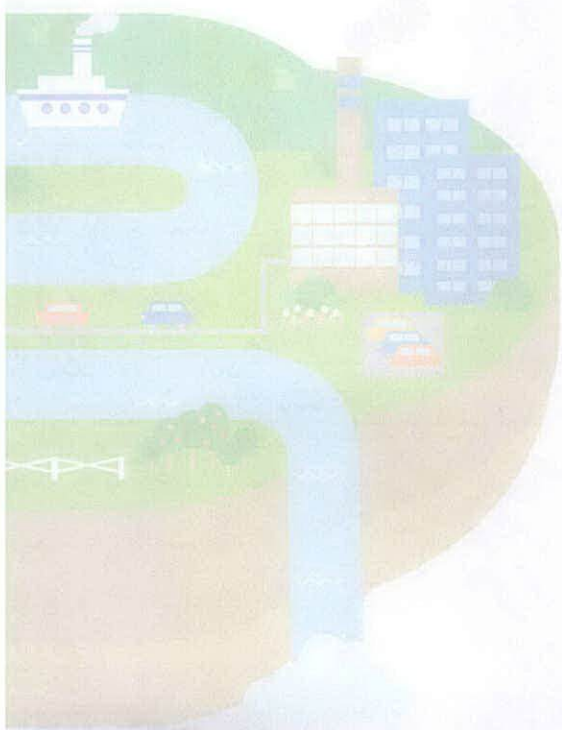
BUDI KARYA SUMADI



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si







PERJANJIAN KINERJA

2019



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 merupakan pernyataan perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2019 yang menjadi tolak ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2019.

Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, 17 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784



PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah Dalam	IKP 1a	Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0,676
		IKP 1b	Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97,00
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKP 2a	Rasio kejadian kecelakaan AKAP	%	7,9
		IKP 2b	Rasio kejadian kecelakaan Penyeberangan transportasi darat	%	1,2
		IKP 2c	Rasio Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	0,16
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 3a	Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	18
		IKP 3b	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	7,01
		IKP 3c	Presentase penurunan energi listrik pada APJ Solarcell	%	43
		IKP 3d	Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	83,24
		IKP 3e	Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	40
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IKP 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio	0,49
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKP 6a	Presentase implementasi peraturan	%	6,50
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IK 7a	Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%	100,00
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK 8a	Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	50
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKP 9a	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
		IKP 9b	Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai	Efektif
SS10	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKP 10a	Presentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	%	25,37
		IKP 10b	Presentase pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur	%	56,25
SS11	Terwujudnya <i>Good Governance & Clean Government</i> di Sub Sektor Perhubungan Darat	IKP 11a	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85%
		IKP 11b	Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30
		IKP 11c	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30
		IKP 11d	Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100
		IKP 11e	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	83
		IKP 11f	Presentase implementasi sistem informasi yang bangun untuk mendukung proses bisnis	%	100
		IKP 11g	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	96
		IKP 11h	Presentase Penerimaan PNPB	%	100

PROGRAM

1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Rp 4.013.014.163.000,00

Jakarta, 17 J a r 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

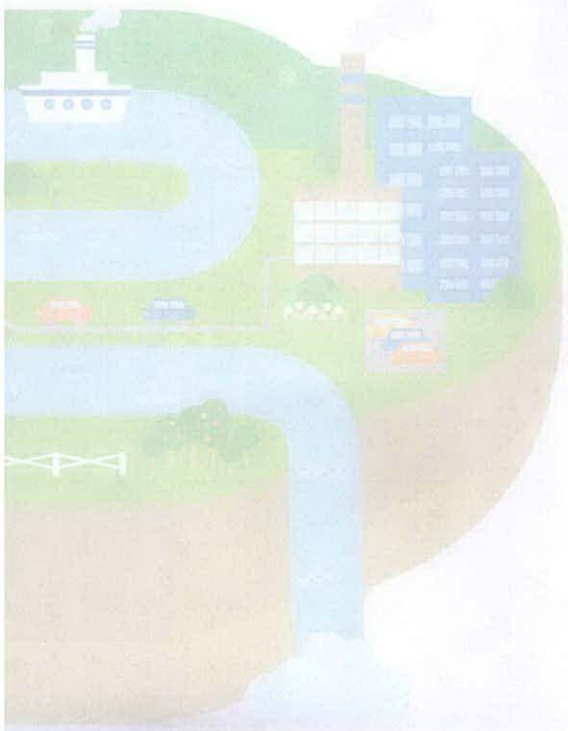
BUDI KARYA SUMADI



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

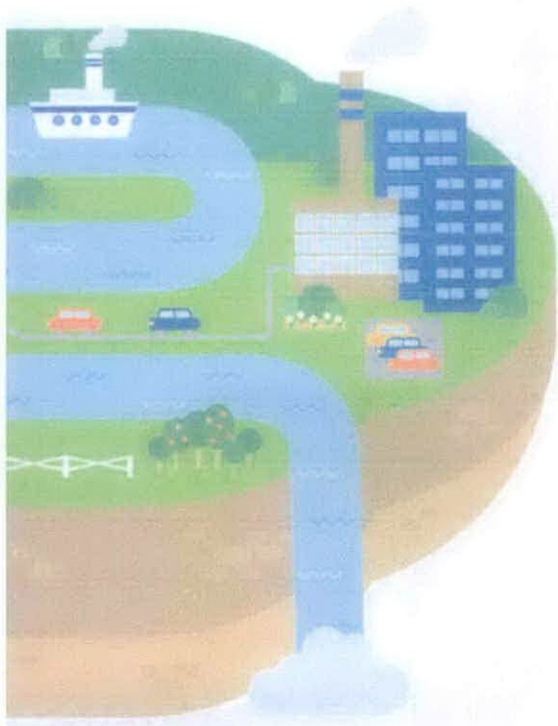






PERJANJIAN KINERJA

2019



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.**

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 merupakan pernyataan perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2019 yang menjadi tolak ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2019.

Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah Dalam	IKP 1a	Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0,676
		IKP 1b	Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKP 2a	Rasio kejadian kecelakaan AKAP	%	7,9
		IKP 2b	Rasio kejadian kecelakaan Penyeberangan transportasi darat	%	1,2
		IKP 2c	Rasio Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	0,16
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 3a	Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	18
		IKP 3b	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	7,01
		IKP 3c	Presentase penurunan energi listrik pada APJ Solarcell	%	43
		IKP 3d	Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	83,24
		IKP 3e	Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	40
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IKP 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio	0,49
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKP 6a	Presentase implementasi peraturan	%	6,50
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IK 7a	Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%	100,00
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK 8a	Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	50
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKP 9a	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
		IKP 9b	Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai	Efektif
SS10	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKP 10a	Presentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	%	25,37
		IKP 10b	Presentase pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur	%	56,25
SS11	Terwujudnya <i>Good Governance & Clean Government</i> di Sub Sektor Perhubungan Darat	IKP 11a	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85%
		IKP 11b	Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30
		IKP 11c	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30
		IKP 11d	Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100
		IKP 11e	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	83
		IKP 11f	Presentase implementasi sistem informasi yang bangun untuk mendukung proses bisnis	%	100
		IKP 11g	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	96
		IKP 11h	Presentase Penerimaan PNBP	%	100

PROGRAM

1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat

Rp 4.013.014.163.000,00

Jakarta,

2019

MENTERI PERHUBUNGAN

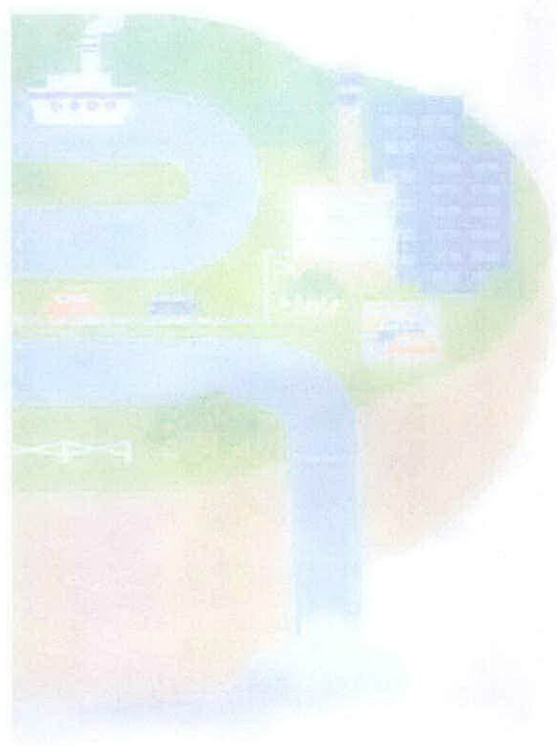
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BUDI KARYA SUMADI




Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	IRLY SARITINI PERMATA, ST, MSc	Kasubag. Analisa dan Evaluasi	5/4-19.	
2.	Diperiksa	ZULMARDI, ATD, MM	Kabag. Perencanaan	5/4-19	
3.	Disetujui	Ir. CUCU MULYANA, DESS	Sekretaris Direktorat Jenderal	5/4/19	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PARAF	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan	IKP 1a Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0,676		Dit. AMM
		IKP 1b Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97		Dit. AMM
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKP 2a Rasio kejadian kecelakaan AKAP	%	7,9		Dit. Binkes
		IKP 2b Rasio kejadian kecelakaan angkutan penyeberangan transportasi darat	%	1,2		
		IKP 2c Rasio Penerapan Stresiliasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	0,16		Dit. Prasarana, Dit. Binkes
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 3a Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	18		Dit. AMM
		IKP 3b Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	7,01		Dit. Sarana
		IKP 3c Presentase penurunan energi listrik pada APJ Solarcell	%	43		Dit. Lalin
		IKP 3d Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	83,24		Dit. AMM
		IKP 3e Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	40		Dit. Lalin
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 4a Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5		Dit. AMM
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	IKP 5a Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio	0,49		Dit. AMM
SS6	Tertaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKP 6a Presentase implementasi peraturan	%	6,50		Bag. Hukum dan Humas, Setditjen
SS7	Tertaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IKP 7a Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%	100,00		Dit. Lalin
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IKP 8a Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	50		Dit. Binkes
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKP 9a Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3		Bagian Perencanaan Setditjen
		IKP 9b Indeks efektivitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PILPK)	Nilai	Efektif		Bagian Keuangan, Setditjen
SS10	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKP 10a Presentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	%	25,37		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
		IKP 10b Presentase pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur	%	56,25		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
	Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat	IKP 11a Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85%		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
		IKP 11b Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
		IKP 11c Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
		IKP 11d Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100		Bagian Keuangan, Setditjen
		IKP 11e Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	83		Bagian Kepegawaian, Setditjen
		IKP 11f Presentase implementasi sistem informasi yang handal untuk mendukung proses bisnis	%	100		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 11g Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	96		Bagian Keuangan, Setditjen
		IKP 11h Presentase Penerimaan PABP	%	100		Bagian Keuangan, Setditjen

PROGRAM

ANGGARAN

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Rp 1.013.041.141.000.00

Jakarta, Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BUDI KARYA SUMADI

Dr. BUDI KATYADI SH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)	PARAF (7)	PIC (8)
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan	IKP 1a Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0,676		Dit. AMM
		IKP 1b Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97		Dit. AMM
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKP 2a Rasio kejadian kecelakaan AKAP	%	7,9		Dit. Binkes
		IKP 2b Rasio kejadian kecelakaan angkutan penyeberangan transportasi darat	%	1,2		
		IKP 2c Rasio Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	0,16		Dit. Prasarana, Dit. Binkes
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 3a Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	18		Dit. AMM
		IKP 3b Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	7,01		Dit. Sarana
		IKP 3c Presentase penurunan energi listrik pada API Solarcell	%	43		Dit. Lalin
		IKP 3d Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	83,24		Dit. AMM
		IKP 3e Kecepatan Rata-Rata di Jalur Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jalur Sibuk	km/jam	40		Dit. Lalin
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 4a Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5		Dit. AMM
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Tertinggal dan Terpencil	IKP 5a Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Tertinggal dan Terpencil	rasio	0,49		Dit. AMM
SS6	Tertersedianya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKP 6a Presentase implementasi peraturan	%	6,50		Bag. Hukum dan Humas, Setditjen
SS7	Tertersedianya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IKP 7a Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalatin	%	100,00		Dit. Lalin
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IKP 8a Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	50		Dit. Binkes
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKP 9a Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 9b Indeks efektifitas Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai	Efektif		Bagian Keuangan, Setditjen
SS10	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKP 10a Presentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	%	25,37		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
		IKP 10b Presentase pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur	%	56,25		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
	Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat	IKP 11a Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85%		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
		IKP 11b Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
		IKP 11c Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30		Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen
		IKP 11d Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100		Bagian Keuangan, Setditjen
		IKP 11e Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	83		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 11f Presentase implementasi sistem Informasi yang dibangun untuk mendukung proses bisnis	%	100		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 11g Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	96		Bagian Keuangan, Setditjen
		IKP 11h Presentase Penerimaan PNBK	%	100		Bagian Keuangan, Setditjen

PROGRAM

ANGGARAN

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Rp 4.013.041.163.000.00

Jakarta, Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BUDI KARYA SUMADI

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)	PARAF (6)	PIC (8)
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan	IKP 1a Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0,676		Dit. AMM
		IKP 1b Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97		Dit. AMM
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKP 2a Rasio kejadian kecelakaan AKAP	%	7,9		Dit. Binkes
		IKP 2b Rasio kejadian kecelakaan angkutan penyeberangan transportasi darat	%	1,2		
		IKP 2c Rasio Penerapan Streslisis: Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	0,16		Dit. Prasarana, Dit. Binkes
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 3a Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	18		Dit. AMM
		IKP 3b Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	7,01		Dit. Sarana
		IKP 3c Persentase penurunan energi listrik pada API Solarcell	%	43		Dit. Lain
		IKP 3d Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	85,24		Dit. AMM
		IKP 3e Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	40		Dit. Lain
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 4a Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5		Dit. AMM
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Tertinggal dan Terperdi	IKP 5a Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Tertinggal dan Terperdi	rasio	0,49		Dit. AMM
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKP 6a Presentase implementasi peraturan	%	6,50		Bag. Hukum dan Humas, Setditjen
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IK 7a Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalatin	%	100,00		Dit. Lain
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK 8a Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	50		Dit. Binkes
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKP 9a Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 9b Indeks efektivitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PILK)	Nilai	Efektif		Bagian Keuangan, Setditjen
SS10	Terwujudnya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKP 10a Presentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	%	25,37		Bagian Kepegawalan dan Umum, Setditjen
		IKP 10b Presentase pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur	%	56,25		Bagian Kepegawalan dan Umum, Setditjen
		IKP 11a Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85%		Bagian Kepegawalan dan Umum, Setditjen
		IKP 11b Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30		Bagian Kepegawalan dan Umum, Setditjen
		IKP 11c Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30		Bagian Kepegawalan dan Umum, Setditjen
		IKP 11d Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100		Bagian Keuangan, Setditjen
		IKP 11e Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	83		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 11f Presentase implementasi sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung proses bisnis	%	100		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 11g Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	96		Bagian Keuangan, Setditjen
		IKP 11h Presentase Penerimaan PRRP	%	100		Bagian Keuangan, Setditjen

PROGRAM	ANGGARAN
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Rp 4.013.041.163.000,00

Jakarta, Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BUDI KARYA SUKADI

Drs. SUNG SETIYADI, SH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)	PARAF (7)	PIC (8)
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan	IKP 1a Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0,676		Dit. AMM
		IKP 1b Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97		Dit. AMM
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKP 2a Rasio kejadian kecelakaan AKAP	%	7,9		Dit. Blinks
		IKP 2b Rasio kejadian kecelakaan angkutan penyeberangan transportasi darat	%	1,2		
		IKP 2c Rasio Penerapan Stresifikasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	0,16		Dit. Prasarana, Dit. Blinks
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 3a Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	18		Dit. AMM
		IKP 3b Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional	%	7,01		Dit. Sarana
		IKP 3c Presentase penurunan energi listrik pada API Solarcell	%	43		Dit. Lalin
		IKP 3d Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	83,24		Dit. AMM
		IKP 3e Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	40		Dit. Lalin
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 4a Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5		Dit. AMM
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Tertuar dan Terpencil	IKP 5a Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Tertuar Dan Terpencil	rasio	0,49		Dit. AMM
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKP 6a Presentase implementasi peraturan	%	6,50		Bag. Hukum dan Humas, Setditjen
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IK 7a Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%	100,00		Dit. Lalin
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK 8a Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	50		Dit. Blinks
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKP 9a Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 9b Indeks efektivitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai	Efektif		Bagian Keuangan, Setditjen
SS10	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKP 10a Presentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	%	25,37		Bagian Kepegawain dan Umum, Setditjen
		IKP 10b Presentase pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur	%	56,25		Bagian Kepegawain dan Umum, Setditjen
		IKP 11a Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85%		Bagian Kepegawain dan Umum, Setditjen
		IKP 11b Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30		Bagian Kepegawain dan Umum, Setditjen
		IKP 11c Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	92,30		Bagian Kepegawain dan Umum, Setditjen
		IKP 11d Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100		Bagian Keuangan, Setditjen
		IKP 11e Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	83		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 11f Presentase implementasi sistem Informasi yang bangun untuk mendukung proses bisnis	%	100		Bagian Perencanaan, Setditjen
		IKP 11g Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	96		Bagian Keuangan, Setditjen
		IKP 11h Presentase Penerimaan PNEP	%	100		Bagian Keuangan, Setditjen

PROGRAM

ANGGARAN

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Rp 4.013.041.163.000,00

Jakarta, Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BUDI KARYA SUMADI

Dra. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506127
email : hubdat @ hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

NOTA DINAS

Nomor: 63 /AJ/1/2019

Kepada Yth : Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat
Dari : Direktur Angkutan dan Multimoda
Perihal : Pengisian dan Persetujuan Perjanjian Kinerja 2019 Ditjen Hubdat
sesuai dengan organisasi sebagaimana dalam PM 189/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

1. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 126/CAN/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Pengisian dan Persetujuan Perjanjian Kinerja 2019 Ditjen Hubdat sesuai dengan organisasi sebagaimana dalam PM 189/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dengan ini kami menyetujui nilai target yang terdapat pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) kontribusi dari Direktorat Angkutan dan Multimoda sebagaimana terinci pada tabel berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai	IKP 1a	Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0.676
		IKP 1b	Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IKP 3a	Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	18
		IKP 3d	Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	83.24
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IKP 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IKP 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio	0.49

2. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Februari 2019

DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA

AHMAD YANI, ATD, MT

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196509301990031003

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua